

- I. DAFTAR ISI
- II. DAFTAR TABEL
- III. DAFTAR GAMBAR-GRAFIK
- IV. DAFTAR LAMPIRAN
- V. KATA PENGANTAR

VI. PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari (i) Laporan Realisasi Anggaran; (ii) Neraca; (iii) Laporan Operasional; (iv) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (v) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan, arus kas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Kepulauan Riau,

Dr. Drs. Muhammad Hasbi. M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP.19660228 198602 1 006

VII. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023



PEMERINTAHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024
01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5	BELANJA DAERAH	10.690.704.773,00	10.566.225.571,36	98,84	12.699.183.381,07
5.1	BELANJA OPERASI	10.615.687.398,90	10.505.135.571,36	98,96	12.080.423.360,00
5.1.01	Belanja Pegawai	5.916.342.660,35	5.887.518.189,00	99,51	5.622.607.668,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.699.344.738,55	4.617.617.382,36	98,26	6.457.815.692,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	10.615.687.398,90	10.505.135.571,36	98,96	12.080.423.360,00
5.2	BELANJA MODAL	75.017.374,10	61.090.000,00	81,43	618.760.021,07
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	75.017.374,10	61.090.000,00	81,43	155.635.590,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	463.124.431,07
	JUMLAH BELANJA MODAL	75.017.374,10	61.090.000,00	81,43	618.760.021,07
	JUMLAH BELANJA	10.690.704.773,00	10.566.225.571,36	98,84	12.699.183.381,07
	SURPLUS/DEFISIT	(10.690.704.773,00)	(10.566.225.571,36)	98,84	(12.699.183.381,07)

Tanjungpinang, 30 Januari 2025
Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Kepulauan Riau,



Dr. Drs. Muhammad Hasbi. M.Si
Pembina Utama Madya IV/d
NIP.19660228 198602 1 006

VIII. NERACA

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
NERACA
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023



PEMERINTAHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Neraca
TAHUN ANGGARAN 2024
1 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024



Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2024	2023
1	ASET	11.403.808.215,55	11.783.134.301,55
1.1	ASET LANCAR	1.202.587.070,00	1.178.583.970,00
1.1.11	Beban Dibayar Dimuka	18.750.000,00	18.750.000,00
1.1.12	Persediaan	1.183.837.070,00	1.159.833.970,00
	JUMLAH ASET LANCAR	1.202.587.070,00	1.178.583.970,00
1.3	ASET TETAP	9.960.759.349,55	10.604.550.331,55
1.3.01	Tanah	6.915.000.000,00	6.915.000.000,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	15.552.134.289,00	15.835.232.576,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan	2.528.209.223,48	2.888.901.918,48
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	516.959.431,07	516.959.431,07
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(15.551.543.594,00)	(15.551.543.594,00)
	JUMLAH ASET TETAP	9.960.759.349,55	10.604.550.331,55
1.5	ASET LAINNYA	240.461.796,00	0,00
1.5.04	Aset Lain-lain	240.461.796,00	0,00
	JUMLAH ASET LAINNYA	240.461.796,00	0,00
	JUMLAH PROPERTI INVESTASI	0,00	0,00
	JUMLAH ASET	11.403.808.215,55	11.783.134.301,55
2	KEWAJIBAN	40.590.000,00	0,00
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	40.590.000,00	0,00
2.1.06	Utang Belanja	40.590.000,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	40.590.000,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	40.590.000,00	0,00
3	EKUITAS	11.836.437.401,55	11.783.134.301,55
3.1	EKUITAS	11.836.437.401,55	11.783.134.301,55
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO	(10.596.420.671,36)	(12.771.976.525,00)
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	10.566.225.571,36	12.656.686.803,50
	JUMLAH EKUITAS	11.836.437.401,55	11.783.134.301,55
Kode Rekening	Uraian	2024	2023
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	11.877.027.401,55	11.783.134.301,55

Tanjungpinang, 30 Januari 2025
Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Kepulauan Riau,



Dr. Drs. Muhammad Hasbi. M.Si
Pembina Utama Madya IV/d
NIP. 19660228 198602 1 006

IX. LAPORAN OPERASIONAL

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

LAPORAN OPERASIONAL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023



PEMERINTAHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
LAPORAN OPERASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2024
1 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024



Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
7	PENDAPATAN	0,00	552.402.301,00	(552.402.301,00)	(100,00)
7.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	0,00	552.402.301,00	(552.402.301,00)	(100,00)
7.3.01	Pendapatan Hibah-LO	0,00	552.402.301,00	(552.402.301,00)	(100,00)
	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	0,00	552.402.301,00	(552.402.301,00)	(100,00)
	JUMLAH PENDAPATAN	0,00	552.402.301,00	(552.402.301,00)	(100,00)
8	BEBAN	10.596.420.671,36	13.236.378.826,00	(2.639.958.154,64)	(19,94)
8.1	BEBAN OPERASI	10.596.420.671,36	12.573.230.011,00	(1.976.809.339,64)	(15,72)
8.1.01	Beban Pegawai	5.887.518.189,00	5.622.607.668,00	264.910.521,00	4,71
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	4.708.902.482,36	6.950.622.343,00	(2.241.719.860,64)	(32,25)
	JUMLAH BEBAN OPERASI	10.596.420.671,36	12.573.230.011,00	(1.976.809.339,64)	(15,72)
8.1.08	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	0,00	663.148.815,00	(663.148.815,00)	(100,00)
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0,00	596.620.727,00	(596.620.727,00)	(100,00)
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00	57.912.097,00	(57.912.097,00)	(100,00)
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	8.615.991,00	(8.615.991,00)	(100,00)
	JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	0,00	663.148.815,00	(663.148.815,00)	(100,00)
	JUMLAH BEBAN	10.596.420.671,36	13.236.378.826,00	(2.639.958.154,64)	(19,94)
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(10.596.420.671,36)	(12.683.976.525,00)	2.087.555.853,64	(16,46)

Tanjungpinang, 30 Januari 2025

Kepala Pelaksana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Provinsi Kepulauan Riau,



Dr. Drs. Muhammad Hasbi. M.Si

Pembina Utama Madya IV/d

NIP.19660228 198602 1 006

X. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
1 JANUARI 2024 SAMPAI 31 DESEMBER 2024



(Dalam Rupiah)

URAIAN	2024	2023
EKUITAS AWAL	11.783.134.301,55	11.876.093.397,05
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(10.596.420.671,36)	(12.771.976.525,00)
RK PPKD	10.566.225.571,36	12.656.686.803,50
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
LAIN-LAIN	83.498.200,00	22.330.626,00
EKUITAS AKHIR	11.836.437.401,55	11.783.134.301,55

Tanjungpinang, 30 Januari 2025

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Kepulauan Riau,



Dr. Drs. Muhammad Hasbi. M.Si
Pembina Utama Madya IV/d
NIP.19660228 198602 1 006

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyusun Laporan Keuangan SKPD, sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala SKPD atas pelaksanaan APBD.

Laporan Keuangan SKPD terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Neraca;
3. Laporan Operasional;
4. Laporan Perubahan Ekuitas;
5. Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan, merupakan satu kesatuan dengan Laporan Keuangan SKPD.

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan adalah :

1. Sarana pertanggungjawaban dari Kepala SKPD, dalam pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah.
2. Memberikan informasi tentang Laporan Keuangan bagi pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Wujud akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan

akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumberdaya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
2. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPR/DPRD.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan SKPD menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

1. Aset;
2. Kewajiban;
3. Ekuitas dana;
4. Pendapatan;
5. Belanja;

B. Periode Pelaporan Keuangan

Periode Laporan Keuangan ini adalah tahun kalender yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Transaksi yang terkait dengan Laporan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 ini, sangat mungkin terjadi pada Tahun Anggaran 2025, hal tersebut tidak menjadi bagian dari Laporan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024, namun hanya merupakan peristiwa kemudian (**Subsequent Event**) yang mempunyai hubungan/kaitan dengan Laporan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025. Atas peristiwa/transaksi tersebut, kami menyajikan pada Tahun Anggaran 2025.

C. Penanggungjawab Laporan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

Laporan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024, adalah tanggungjawab Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau..

D. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan Laporan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, mengacu pada :

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, pasal 23;
2. Undang-undang nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang nomor 1 tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang nomor 15 tahun 2004, tentang Pemeriksaan Keuangan dan Tanggungjawab Pengelolaan Keuangan Negara;
5. Undang-undang nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang nomor 33 tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 2010, tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2023, tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.
16. Peraturan Gubernur Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.
17. Peraturan Gubernur Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 40 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.
18. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 48 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

B. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan catatan atas Laporan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan;
- B. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan;

Penanggungjawab Laporan Keuangan Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

C. Sistematika Penulisan Laporan Keuangan

Bab II Profil SKPD

- A. Sumber Daya Manusia
- B. Strategi dan Arah Kebijakan
- C. Program dan Kegiatan

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Tahun 2024

- A. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2024
- B. Hambatan dan Kendala yang Dijumpai Dalam Pencapaian Target Realisasi Anggaran yang telah ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

- A. Entitas Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah
- B. Asumsi Dasar Laporan Keuangan
- C. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- D. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- E. Kebijakan Akuntansi Pendapatan
- F. Kebijakan Akuntansi Belanja
- G. Kebijakan Akuntansi Persediaan
- H. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap
- I. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

- A. Laporan Realisasi Anggaran;
- B. Neraca;
- C. Laporan Operasional;
- D. Laporan Perubahan Ekuitas;

Bab VI Penjelasan Atas Informasi non Keuangan

- A. Domisili dan Bentuk Hukum Entitas Pelaporan
- B. Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas Pelaporan

Bab VII Penutup

BAB II

PROFIL BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

A.SUMBER DAYA MANUSIA (PEGAWAI)

Dukungan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas, profesional, berpengetahuan serta memiliki pengalaman dalam mengelola suatu organisasi atau lembaga agar dapat berjalan secara optimal merupakan hal yang sangat diperlukan. Keberhasilan pencapaian kinerja organisasi akan sangat ditentukan oleh kinerja sumber daya manusia yang ada dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.

Sebagai salah satu perangkat kerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau didukung oleh sejumlah personil atau pegawai yang mengemban tugas dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Saat ini kondisi kepegawaian pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau berjumlah 58 orang terbagi menjadi 39 orang pegawai berjenis kelamin laki-laki dan 19 orang pegawai berjenis perempuan. Berdasarkan status kepegawaian terdapat Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 21 orang, Pegawai Tidak Tetap (PTT) 21 orang dan Tenaga Harian Lepas (THL) sebanyak 14 orang. Sedangkan berdasarkan jabatannya terdapat pejabat eselon II 1 orang, eselon III 4 orang, eselon IV 1 orang dan Jabatan Fungsional 6 orang (Tabel 1. 1 dan 1.2).

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

No	Pegawai	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Pegawai Negeri Sipil	15	8	23
2	Pegawai Tidak Tetap	15	6	21
3	Tenaga Harian Lepas	9	5	14
Jumlah		39	19	58

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Eselon II	1	0	1
2	Eselon III	3	1	4
3	Eselon IV	0	1	1
4	Fungsional	4	2	6
Jumlah		8	4	12

Berdasarkan golongan terdapat pegawai yang memiliki jenis golongan II sebanyak 2 orang, golongan III sebanyak 15 orang golongan IV sebanyak 6 orang, PTT sebanyak 21 orang dan THL sebanyak 14 orang (Tabel 1.3).

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Golongan II	2	0	2
2	Golongan III	9	7	15
3	Golongan IV	5	1	6
4	PTT	15	6	21
5	THL	9	5	14
Jumlah		39	19	58

Berdasarkan tingkat pendidikan terdapat pegawai berpendidikan S3 sebanyak 2 orang, S2 sebanyak 2 orang, S1 sebanyak 29 orang, D3/D4 sebanyak 7 orang, SMA sebanyak 17 orang dan SMP sebanyak 1 orang (Tabel 1.4)

Tabel 1.4
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Doktor (S3)	2	0	2
2	Pasca Sarjana (S2)	1	1	2
3	Sarjana (S1)	16	13	29
4	Diploma (D3/D4)	5	2	7
5	SMA	13	4	17
6	SMP	1	0	1
Jumlah		38	20	58

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau memperhatikan tugas dan fungsinya sebagai perangkat daerah yang merumuskan penanggulangan bencana serta penyediaan data dan analisis penanggulangan bencana dalam lingkup provinsi maupun internal organisasi.

Sebagai perangkat daerah perumus penanggulangan bencana dalam lingkup provinsi, tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, penyelarasan, fasilitasi, dan pelaksanaan fungsi urusan wajib pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi. Tugas tersebut diwujudkan melalui fungsi perumusan kebijakan teknis, dukungan teknis, pengendalian dan evaluasi penanggulangan bencana, serta penyediaan data untuk penanggulangan bencana.

Sebagai perangkat daerah internal organisasi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan tugas dan fungsi administrasi, serta peningkatan kapasitas SDM penanggulangan bencana.

Strategi dan arah kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau mengacu pada tugas dan fungsi setiap bidang yang dikaitkan dengan kebijakan jangka menengah Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026.

Upaya dalam pencapaian tujuan serta sasaran kinerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau diperlukan sebuah strategi dan arah kebijakan dengan memprioritaskan upaya yang dilakukan untuk mengurangi resiko bencana dalam pembangunan daerah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau dengan dukungan berbagai pihak menetapkan strategi dan arah kebijakan agar upaya dalam penanggulangan bencana lintas sektor dapat direncanakan dan diimplementasikan secara baik sehingga sasaran pembangunan dapat dicapai.

C. SUB KEGIATAN

Tabel 1.4
Sub, Kegiatan, Anggaran dan Realisasi TA.2024

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	124.584.754,00	124.481.692,00
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.927.749.010,00	5.898.618.739,00
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	564.806.413,00	552.511.564,00
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	150.000.000,00	150.000.000,00
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.441.871.471,00	1.436.023.845,00
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	255.766.929,00	212.387.655,36
7.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	14.640.770,00	14.542.753,00
8.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	680.072.394,00	660.135.293,00
9.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	945.648.618,00	939.861.201,00
10	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	585.294.412,00	577.662.829,00

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN TAHUN 2024

A. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun anggaran 2024

Ikhtisar pencapaian target kinerja keuangan mencerminkan keberhasilan dalam pencapaian kinerja keuangan dan ketaatan atas pelaksanaan anggaran tahun 2024 dengan membandingkan anggaran dan realisasinya.

Pencapaian target belanja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau menurut klasifikasi jenis pendapatan untuk Tahun Anggaran 2024, adalah sebagai berikut :

*Tabel 1.5
Pencapaian Target Belanja TA.2024*

No Rek	Uraian	Anggaran(Rp)	Realisasi (Rp)	%
5.	BELANJA	10.690.704.773,00	10.566.225.571,36	98,84
5.1	Belanja Operasi	10.615.687.398,90	10.505.135.571,36	98,96
5.1.01	Belanja pegawai	5.916.342.660,35	5.887.518.189,00	99,51
5.1.02	Belanja barang dan jasa	4.699.344.738,55	4.617.617.382,36	98,26
5.2	Belanja Modal	75.017.374,10	61.090.00000	81,43
5.2.02	Belanja peralatan dan mesin	75.017.374,10	61.090.00000	81,43

Berdasarkan pencapaian kinerja belanja daerah berdasarkan jenis belanja, seperti dalam tabel di atas, menunjukkan daya serap anggaran belanja yang optimal. Dari anggaran belanja yang disediakan Tahun 2024 sebesar Rp **10.690.704.773,00** terserap sebesar Rp **10.566.225.571,36** atau **98,84%** (Tabel 1.5)

B. Hambatan dan Kendala yang Dijumpai Dalam Pencapaian Target Realisasi Anggaran yang Telah Ditetapkan.

Hambatan dan kendala yang dijumpai dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, terutama dalam mencapai target pendapatan dan belanja daerah sebagai berikut :

Terdapat 4 (empat) Sub Kegiatan yang realisasi serapan anggarannya di bawah 91 % yaitu:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan

Penggandaan 84,91 %, hal ini di karenakan pagu Anggaran 2024 belanja barang (SSH) lebih tinggi dari harga pasar, sehingga terjadi Silpa Anggaran.

- b. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/ Material 85,65 %, hal ini di karenakan pagu Anggaran 2024 belanja barang (SSH) lebih tinggi dari harga pasar, sehingga terjadi Silpa Anggaran.
- c. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 82,64 %, hal ini di karenakan terjadi tunda bayar pelaksanaan pekerjaan yang telah di jalankan.
- d. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 78,95 %, hal ini di karenakan terjadi tunda bayar pelaksanaan pekerjaan yang telah di jalankan.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

A. Entitas Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan entitas akuntansi pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

B. Asumsi Dasar Laporan Keuangan

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:

- a. Asumsi kemandirian entitas;
- b. Asumsi kesinambungan entitas; dan
- c. Asumsi keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement).

C. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Basis akuntansi yang di gunakan untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024, adalah basis kas yang dimodifikasi menuju akrual base (*Cash base modified toward accrual base*) :

1. Basis Kas untuk pengakuan pengukuran Laporan Realisasi Anggaran untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan;
2. Basis akrual untuk pengakuan pengukuran dalam pos-pos Neraca, untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana;
3. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan di akui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas di keluarkan dari kas daerah. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak mengakui adanya laba, melainkan dengan istilah sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan, dan dengan pengeluaran belanja dan pembiayaan;
4. Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan di catat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi

lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau di bayar oleh kas daerah;

D. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

1. Basis Pengukuran Pos-pos Laporan Keuangan.

Pengukuran adalah suatu proses menetapkan besarnya suatu transaksi dengan menggunakan nilai uang, sebagai dasar pencatatan transaksi tersebut. Adapun basis pengukuran dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, adalah sebagai berikut:

- a. Pengukuran pos-pos dalam Laporan Keuangan, menggunakan basis historis atau nilai perolehan;
- b. Aset di catat sebesar nilai pengeluaran kas atau nilai wajar dari imbalan yang di berikan untuk memperoleh aset tersebut;
- c. Kewajiban di catat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban, atau nilai sekarang dari jumlah kas yang di harapkan akan di bayarkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut;
- d. Pengukuran pos-pos Laporan Keuangan menggunakan mata uang rupiah, transaksi yang menggunakan mata uang asing harus di konversi terlebih dahulu dengan kurs tengah Bank Indonesia, dan di nyatakan dalam mata uang rupiah.

2. Kesesuaian Kebijakan Akuntansi Yang Diterapkan Dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan

Laporan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024, telah disusun dan di sajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, oleh karena itu angka - angka yang disajikan dibuat berdasarkan catatan dan dokumen pendukung yang memadai, penerapan prinsip - prinsip pengendalian intern transaksi keuangan, pengklasifikasian, pengukuran dan pengungkapan, serta pengungkapan lainnya yang dipandang perlu, untuk dapat menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Wajar.

E. Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Kebijakan akuntansi atas belanja daerah yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Belanja diakui pada saat:

- a. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk seluruh transaksi di SKPD dan SKPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD.
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD.
- c. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.

Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja dan akun terkait pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya setelah Laporan Keuangan Audited terbit, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan pada kelompok Pendapatan Asli Daerah, jenis Lain-lain PAD Yang Sah–LRA.

F. Kebijakan Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan diakui pada saat:

- a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan handal;
- b. Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan pada akun konstruksi dalam pengerjaan, tidak diakui sebagai persediaan.

Persediaan dalam kondisi sudah tidak layak pakai/usang/rusak/sejenisnya berdasarkan hasil verifikasi/pengecekan/inventarisasi yang dituangkan dalam Berita Acara *stock opname*, disajikan sebagai beban persediaan dan dilaporkan dalam laporan operasional serta diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Jika ada hasil penjualan atas persediaan yang telah usang atau rusak diakui sebagai Lain-lain PAD yang Sah-LRA dan Lain-lain PAD yang Sah-LO.

Pengakuan Beban Persediaan

Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian laporan operasional.

Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*).

Pencatatan persediaan dilakukan dengan dua metode, yaitu:

a. Metode Perpetual, untuk jenis persediaan yang sifatnya *continues* dan membutuhkan kontrol yang besar, seperti obat-obatan. Dengan metode perpetual, pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu ter-update. Dalam hal pencatatan secara perpetual, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.

SKPD yang menggunakan metode perpetual, melakukan pencocokan dengan perhitungan fisik (*stock opname*). Apabila jumlah unit persediaan antara metode perpetual tidak sama dengan hasil perhitungan fisik maka diunggulkan pelaporan atas persediaan berdasarkan hasil perhitungan fisik (*stock opname*). Perbedaan jumlah unit persediaan dan sebab perbedaan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

b. Metode Periodik, untuk persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti Alat Tulis Kantor (ATK). Dengan metode ini, pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak meng-update jumlah persediaan. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan *stock opname* pada akhir periode. Dalam hal persediaan dicatat secara periodik, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan

cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

Beban persediaan diakui pada saat setiap pembelian persediaan. Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian laporan operasional.

G. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.

Apabila Aset Tetap berasal dari pembelian/pengadaan (APBD), maka pengakuan aset tersebut diakui pada saat telah ada berita acara serah terima atau dokumen lain yang dipersamakan.

Apabila Aset Tetap berasal dari pihak ketiga (lembaga/pemerintah lainnya) aset diakui pada saat ada berita acara penyerahan aset dan adanya berita acara pemeriksaan fisik oleh tim pemeriksa aset.

Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi semua kriteria sebagai berikut:

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- e. Tidak dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga;
- f. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;

g. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan

Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

H. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban dikategorikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

- a. Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b. Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
- c. Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban dapat timbul dari:

- a. Transaksi dengan Pertukaran (*exchange transactions*).
- b. Transaksi tanpa Pertukaran (*non-exchange transactions*).
- c. Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah (*government-related events*).
- d. Kejadian yang diakui Pemerintah (*government-acknowledge events*).

Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk

memberikan uang atau sumberdaya lain di masa depan, misal utang atas belanja ATK.

Dalam transaksi tanpa pertukaran, kewajiban diakui ketika Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan.

Dalam kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, kewajiban diakui ketika Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Dalam kejadian yang diakui Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, kewajiban diakui ketika Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah, misal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

1. Belanja

Anggaran dan realisasi belanja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024, berdasarkan klasifikasi ekonomi adalah sebagai berikut :

Tabel 1.6
Anggaran dan Realisasi Belanja

No Rek	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% tase
5.	BELANJA	10.690.704.773,00	10.566.225.571,36	98,84
5.1	Belanja Operasi	10.615.687.398,90	10.505.135.571,36	98,96
5.1.01	Belanja pegawai	5.916.342.660,35	5.887.518.189,00	99,51
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.699.344.738,55	4.617.617.382,36	98,96
5.2	Belanja Modal	75.017.374,10	61.090.000,00	81,43
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	75.017.374,10	61.090.000,00	81,43

1) Belanja

2. Belanja Operasi

Realisasi Belanja operasi Tahun 2024 sebesar Rp.**10.505.135.571,36** atau **98,96%** dari anggaran belanja operasi yang disediakan sebesar Rp**10.615.687.398,90**. Penjelasan atas realisasi Belanja Operasi Tahun 2024 sebagai berikut :

a) Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2024 sebesar Rp.5.887.518.189,00 atau 99,51% dari anggaran yang disediakan sebesar Rp.5.916.342.660,35 Sesuai dengan konversi akun – akun, maka Belanja Pegawai terdiri atas Kelompok Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

Belanja Pegawai yang termasuk dalam Kelompok Belanja Tidak Langsung, terdiri Objek Belanja Gaji dan Tunjangan dan Tambahan Penghasilan.

Belanja Pegawai yang termasuk dalam Kelompok Belanja Langsung, terdiri dari Objek Belanja Honorarium PNS, Honorarium Non PNS

Tabel 1.7
Belanja Pegawai

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)	REALISASI (Rp)
	2024	2024		2023
1	2	3	4	5
Belanja Pegawai	5.916.342.660,35	5.887.518.189,00	99,51	5.622.607.668,00
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.811.552.067,35	1.800.166.805,00	99,37	1.730.232.021,00
Belanja Gaji Pokok ASN	1.264.298.600,00	1.264.298.600,00	100,00	1.208.624.940,00
Belanja Gaji Pokok PNS	1.264.298.600,00	1.264.298.600,00	100,00	1.208.624.940,00
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	112.857.946,00	112.848.126,00	99,99	109.715.952,00
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	112.857.946,00	112.848.126,00	99,99	109.715.952,00
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	123.620.000,00	123.620.000,00	100,00	123.620.000,00
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	123.620.000,00	123.620.000,00	100,00	123.620.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	78.585.202,00	67.240.000,00	85,56	55.620.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	78.585.202,00	67.240.000,00	85,56	55.620.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	29.275.000,00	29.275.000,00	100,00	28.290.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	29.275.000,00	29.275.000,00	100,00	28.290.000,00
Belanja Tunjangan Beras ASN	63.802.020,00	63.802.020,00	100,00	66.771.240,00
Belanja Tunjangan Beras PNS	63.802.020,00	63.802.020,00	100,00	66.771.240,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	7.619.902,00	7.619.902,00	100,00	5.352.234,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	7.619.902,00	7.619.902,00	100,00	5.352.234,00
Belanja Pembulatan Gaji ASN	19.605,35	19.605,00	100,00	18.342,00
Belanja Pembulatan Gaji PNS	19.605,35	19.605,00	100,00	18.342,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	121.041.524,00	121.011.284,00	99,98	122.380.105,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	121.041.524,00	121.011.284,00	99,98	122.380.105,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.608.074,00	2.608.074,00	100,00	2.459.794,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.608.074,00	2.608.074,00	100,00	2.459.794,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	7.824.194,00	7.824.194,00	100,00	7.379.414,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	7.824.194,00	7.824.194,00	100,00	7.379.414,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	3.754.974.593,00	3.737.735.384,00	99,54	3.535.837.647,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.685.395.486,00	1.678.499.803,00	99,59	1.586.336.201,00

Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.685.395.486,00	1.678.499.803,00	99,59	1.586.336.201,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	442.968.537,00	442.968.537,00	100,00	425.025.468,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	442.968.537,00	442.968.537,00	100,00	425.025.468,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.626.610.570,00	1.616.267.044,00	99,36	1.524.475.978,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.626.610.570,00	1.616.267.044,00	99,36	1.524.475.978,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	349.816.000,00	349.616.000,00	99,94	356.538.000,00
Belanja Honorarium	349.816.000,00	349.616.000,00	99,94	356.538.000,00
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	341.656.000,00	341.456.000,00	99,94	348.378.000,00
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.160.000,00	8.160.000,00	100,00	8.160.000,00

b) Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang Tahun 2024 sebesar Rp. 4.617.617.382,36 atau 98,26% dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. 4.699.344.738,55 Belanja Barang dan Jasa termasuk dalam Kelompok Belanja Langsung.

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Belanja barang dan jasa ini mencakup belanja barang pakai

habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, dan pemulangan pegawai.

Tabel1.8
Belanja Barang dan Jasa

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2024	REALISASI (Rp) 2024	(%)	REALISASI (Rp) 2023
1	2	3	4	5
Belanja Barang dan Jasa	4.699.344.738,55	4.617.617.382,36	98,26	6.457.815.692,00
Belanja Barang	1.112.602.953,20	1.095.425.990,00	98,46	1.497.312.161,00
Belanja Barang Pakai Habis	1.112.602.953,20	1.095.425.990,00	98,46	1.497.312.161,00
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	850.000,00	850.000,00	100,00	5.463.000,00
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	229.762.728,00	229.520.000,00	99,89	190.064.609,00
Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	0,00	0,00	0,00	2.886.000,00
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	0,00	0,00	0,00	2.012.395,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	4.400.000,00	4.400.000,00	100,00	24.470.000,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	1.300.000,00	1.300.000,00	100,00	18.504.810,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	1.990.000,00	1.990.000,00	100,00	0,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	2.263.734,00	1.800.000,00	79,51	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	36.575.161,00	35.625.059,00	97,40	27.015.945,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	28.416.410,00	27.665.067,00	97,36	25.788.225,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	44.546.511,55	36.525.309,00	81,99	61.251.690,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3.150.000,00	3.050.000,00	96,83	6.630.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	3.076.713,00	3.072.492,00	99,86	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	15.482.761,40	14.310.700,00	92,43	16.655.252,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	8.924.714,25	7.239.178,00	81,11	10.000.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	10.088.124,00	9.701.586,00	96,17	9.875.372,00

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	8.547.000,00	8.470.000,00	99,10	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	3.374.400,00	3.180.000,00	94,24	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	132.653.707,00
Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	4.292.303,00	4.290.000,00	99,95	0,00
Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	477.514.594,00	477.333.000,00	99,96	119.420.000,00
Belanja Natura dan Pakan-Natura	1.210.788,00	1.080.000,00	89,20	187.856.556,00
Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	48.698.505,00	48.344.039,00	99,27	124.800,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	145.229.046,00	142.863.000,00	98,37	428.586.500,00
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	14.594.460,00	14.556.560,00	99,74	7.772.100,00
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	0,00	0,00	44.730.000,00
Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	18.315.000,00	18.260.000,00	99,70	73.932.200,00
Belanja Pakaian Penyelamatan	0,00	0,00	0,00	16.800.000,00
Belanja Pakaian Teknik	0,00	0,00	0,00	7.040.000,00
Belanja Pakaian KORPRI	0,00	0,00	0,00	17.181.000,00
Belanja Pakaian Olahraga	0,00	0,00	0,00	60.598.000,00
Belanja Jasa	2.302.991.913,00	2.281.984.318,00	99,09	2.581.563.167,00
Belanja Jasa Kantor	2.002.512.735,00	1.991.820.680,00	99,47	2.130.150.537,00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	37.520.000,00	37.520.000,00	100,00	180.199.988,00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	192.000.000,00	192.000.000,00	100,00	96.000.000,00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1.330.482.335,00	1.330.038.999,00	99,97	1.361.210.547,00
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	180.000.000,00	180.000.000,00	100,00	180.000.000,00
Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	390.000,00	390.000,00	100,00	1.080.000,00
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	45.655.200,00	45.600.000,00	99,88	2.700.000,00
Belanja Tagihan Telepon	515.221,00	353.500,00	68,61	0,00
Belanja Tagihan Listrik	86.707.225,00	86.707.225,00	100,00	79.668.411,00
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	0,00	0,00	0,00	3.120.000,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	32.761.606,00	31.712.156,00	96,80	31.641.251,00
Belanja Paket/Pengiriman	68.018.500,00	67.425.000,00	99,13	172.380.500,00
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	28.462.648,00	20.073.800,00	70,53	22.149.840,00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	65.532.218,00	64.803.638,00	98,89	64.897.630,00

Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	57.776.093,00	57.162.000,00	98,94	57.178.572,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	3.447.100,00	3.396.278,00	98,53	3.430.691,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	4.309.025,00	4.245.360,00	98,52	4.288.367,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	50.230.000,00	40.760.000,00	81,15	36.800.000,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	12.490.000,00	9.500.000,00	76,06	26.650.000,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	6.000.000,00	4.100.000,00	68,33	0,00
Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	0,00	0,00	0,00	2.950.000,00
Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	8.240.000,00	3.760.000,00	45,63	4.200.000,00
Belanja Sewa Perkakas Bengkel Kerja	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	23.500.000,00	23.400.000,00	99,57	0,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	184.716.960,00	184.600.000,00	99,94	285.880.000,00
Belanja Sewa Bangunan Gudang	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	150.000.000,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
Belanja Sewa Bangunan Parkir	8.880.000,00	8.880.000,00	100,00	8.880.000,00
Belanja Sewa Hotel	17.220.000,00	17.220.000,00	100,00	0,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	8.616.960,00	8.500.000,00	98,64	122.500.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	0,00	0,00	0,00	53.835.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	0,00	0,00	0,00	28.527.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	0,00	0,00	0,00	25.308.000,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
Belanja Pemeliharaan	204.514.381,00	168.013.792,36	82,15	211.986.622,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	142.616.436,00	119.266.160,00	83,63	176.670.622,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	0,00	0,00	3.948.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	105.897.550,00	84.092.560,00	79,41	130.259.570,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat	9.799.331,00	9.400.000,00	95,92	0,00

Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua				
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	3.026.970,00	2.975.000,00	98,28	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	10.156.500,00	9.858.600,00	97,07	10.194.000,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	0,00	0,00	0,00	1.044.288,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	13.736.085,00	12.940.000,00	94,20	17.904.764,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	0,00	0,00	0,00	13.320.000,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	49.105.000,00	35.997.632,36	73,31	35.316.000,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	49.105.000,00	35.997.632,36	73,31	35.316.000,00
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	12.792.945,00	12.750.000,00	99,66	0,00
Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain	12.792.945,00	12.750.000,00	99,66	0,00
Belanja Perjalanan Dinas	1.079.235.491,35	1.072.193.282,00	99,35	2.166.953.742,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.079.235.491,35	1.072.193.282,00	99,35	2.166.953.742,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.079.235.491,35	1.072.193.282,00	99,35	2.166.953.742,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.100.000,00	4.794.200,00	94,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	4.650.000,00	4.650.000,00	100,00	297.015.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	20.280.000,00	20.280.000,00	100,00	0,00

1) Belanja Modal

Realisasi Belanja modal Tahun 2024 sebesar Rp 61.090.000 atau 81,43% dari anggaran belanja operasi yang disediakan sebesar Rp75.017.374,10. Penjelasan atas realisasi Belanja Modal Tahun 2024 sebagai berikut :

a) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh peralatan dan mesin sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga pembelian dan biaya instalasi serta biaya langsung lainnya

untuk memperoleh dan mempersiapkan aset sehingga dapat digunakan

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Tahun 2024 sebesar Rp61.090.000,00 atau 81,43% dari anggaran belanja peralatan dan mesin yang disediakan sebesar Rp75.017.374,10.

B. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Posisi keuangan dalam Neraca Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 secara umum sebagai berikut:

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Aset	11.403.808.215,55	11.783.134.301,55
Kewajiban	40.590.000,00	0,00
Ekuitas Dana	11.836.437.401,55	11.783.134.301,55

I. ASET	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp.11.403.808.215,55	Rp.11.783.134.301,55

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah, sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi dan atau sosial di masa yang akan datang diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah ataupun masyarakat, serta dapat diukur dengan andal dalam satuan mata uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumberdaya yang dapat dipelihara, karena alasan sejarah dan budaya.

Aset Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2024 sebesar Rp11.403.808.215,55 atau mengalami penyusutan sebesar Rp 379.326.086,00 dibandingkan nilai aset per 31 Desember 2023 yang tercatat sebesar Rp.11.783.134.301,55,-

Rincian aset Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Aset Lancar	1.202.587.070,00	1.178.583.970,00
Aset Tetap	9.960.759.349,55,00	10.604.550.331,55
Aset Lainnya	340.461.796,00	0,00
Jumlah	11.403.808.215,22	11.783.134.301,55

a. Aset Lancar	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp.1.202.587.070,00	Rp.1.178.583.970,00

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan.

Nilai Aset lancar Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2024 sebesar Rp.1.202.587.070,00,- dengan rincian sebagai berikut :

1) Kas di Bendahara Pengeluaran	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp 0,-	Rp 0,-

Kas di bendahara pengeluaran adalah aset lancar berupa kas yang tersimpan pada rekening SKPD atas nama bendahra pengeluaran SKPD.

Pengukuran kas di bendahara pengeluaran, berdasarkan realisasi dari penerimaan atas SP2D yang telah di terima oleh rekening kas bendahara pengeluaran, dan realisasi pengeluaran kas berdasarkan jumlah kas yang telah dikeluarkan dari rekening kas bendahara pengeluaran, dengan menggunakan nilai historis dan satuan mata uang rupiah.

Pengakuan atas kas di bendahara pengeluaran, dilakukan manakala penerimaan kas telah benar-benar masuk ke rekening kas bendahara pengeluaran dan pengeluaran kas telah keluar dari rekening bendahara pengeluaran.

Kas di Bendahara Pengeluaran per tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp 0,00 dan sudah dilakukan penyetoran sebesar Rp0,00

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
2) Piutang Pajak	Rp. 0,-	Rp. 0,-

Piutang yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2024 sebesar Rp 0,00. Piutang tersebut terdiri dari:

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
3) Persediaan	Rp.1.183.837.070,00	Rp. 1.159.833.970,00,-

Persediaan yang tercatat per 31 Desember 2024 sebesar Rp . Persediaan tersebut terdiri dari:

1. Hand Sanitizer Rp. 2.497.500,-
2. Antiseptic Rp. 75.429.000,-
3. Life jaket Rompi Pelampung Rp. 20.000.000,-
4. Mesin Gergaji Potong Krisbow Chainsaw Rp. 8.550.000,-
5. RefillTabung Gas Ukuran 50 kg Rp. 2.880.000,-
6. Masker Kain Living Guard (1 Box @ 640) Rp. 768.552.320,-
7. Pelampung Rp. 8.100.000,-
8. Hand Pump Rp. 1.300.000,-
9. Reusable Cloth Mask (Boy) @500 Pcs (4-7 Years) Rp. 10.050.000,-
10. Reusable Cloth Mask (Boy) @500 Pcs (8-12 Years) Rp. 20.000.000,-
11. Reusable Cloth Mask (Girl) @500 Pcs Rp. 30.000.000,-
12. Persediaan Lemari Besi Penyimpanan (Ex Lohas Untuk Penanganan Covid 19 Rp. 10.000.000,-

13. Persediaan Kasur Busa (Ex Lohas Untuk Penanganan Covid 19) Rp.21.750.000,-
14. Persediaan Blanket (Ex Lohas Untuk Penanganan Covid 19) Rp.4.150.000,-
15. Persediaan Bed Cover (Ex Lohas Untuk Penanganan Covid 19) Rp.2.000.000,-
16. Persediaan Tandon Air (Ex Lohas Untuk Penanganan Covid 19) Rp.3.900.000,-
17. Persediaan Tong air +Rangka (Ex Lohas Untuk Penanganan Covid 19) Rp.4.125.000,-
18. Hand Pump Rp. 800.000,-
19. Hand Pum bantuan Satgas Nas BNPB Rp. 750.000,-
20. Reusable Cloth Mask (Boy) @500 Pcs (4-7 Years) Rp. 37.450.000,-
21. Masker Rp. 95.000.000,-
22. Disinfektan 1 liter Rp. 960.000,-
23. Sarung Rp. 638.400,-
24. Rompi Rp. 1.200.100,-
25. Kantong Jenazah Rp. 1.542.750,-
26. Hand Sanitizer @4 Liter Rp. 4.674.000,-
27. Desinfektan @ 4 Liter Rp. 5.120.000,-
28. Sabun Mandi Rp. 4.968.000,-
29. Cooler Box 22 Liter Rp. 3.000.000,-
30. Cooler Box 5,5 Liter Rp. 3.680.000,-
31. Ice Gel Pack Rp. 910.000,-
32. Goodie Bag Rp. 715.000,-
33. Selimut 2023 (PT. Wijaya Sari Guna) Rp. 3.600.000,-
34. Matras 2023 (PT. Ayodia Dialog Semesta) Rp. 8.745.000,-
35. Pakaian Penyelamatan (Life Jacket) Rp. 16.800.000,-

b. Aset Tetap	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp. 9.960.759.349,55	Rp. 10.604.550.331,55

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Rincian Aset Tetap Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut :

*Tabel 1.9
Rincian Aset Tetap*

No	Aset Tetap	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
1	Tanah	6.915.000.000,00	6.915.000.000,00	0,00
2	Peralatan dan Mesin	15.552.134.289,00	15.835.232.576,00	(283.098.287,00)
3	Gedung dan Bangunan	2.528.209.223,48	2.888.901.918,48	(360.692.695,00)
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	516.959.431,07	516.959.431,07	0
5	Aset Tetap Lainnya	240.461.796,00	0	0
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0
	Jumlah			

Penjelasan lebih lanjut atas nilai aset tetap dengan Tahun 2024 akan dijelaskan pada masing-masing jenis aset berikut.

1)	Tanah	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		Rp. 6.915.000.000,00	Rp. 6.915.000.000,00

Nilai aset tanah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2024 sebesar Rp **6.915.000.000,00** tetap sebesar Rp**6.915.000.000,00** sama nilai aset tanah per 31 Desember 2023 yang tercatat sebesar Rp **6.915.000.000,00**

2)	Peralatan dan Mesin	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		Rp. 15.552.134.289,00	Rp. 15.835.232.576,00

Nilai aset peralatan dan mesin Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2024 sebesar **Rp.15.552.134.289,00** menyusut sebesar **Rp. 283.098.287** jika dibandingkan nilai aset peralatan dan mesin per 31 Desember 2023 yang tercatat sebesar Rp **5.835.232.576,00**

3)	Gedung Dan Bangunan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		Rp.2.528.209.223,48	Rp.2.888.901.918,48

Nilai aset gedung dan bangunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2024 sebesar **Rp.2.528.209.223,48** menyusut sebesar Rp. 360.392.691 jika dibandingkan nilai aset gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 yang tercatat sebesar **Rp.2.888.901.918,48**.

4)	Jalan, Irigasi dan Jaringan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		Rp 516.959.431,07	Rp516.959.431,07

Nilai aset jalan, irigasi dan jaringan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2024 sebesar **Rp. 516.959.431,07** tetap sebesar **Rp. 516.959.431,07** jika dibandingkan nilai aset Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 yang tercatat sebesar **Rp. 516.959.431,07**

5)	Aset Tetap Lainnya	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		Rp9.960.759.349,55,00	Rp 10.604.550.331,55

Nilai aset tetap lainnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2024 sebesar **Rp.9.960.759.349,55,00** menyusut **Rp. 643.790.982,00** jika dibandingkan nilai aset tetap lainnya per 31 Desember 2023 yang tercatat sebesar **Rp.10.604.550.331,55**

6).	Aset Lainnya	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		Rp240.461.796,00	Rp 0,00

Nilai aset lainnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2024 berupa aset lain-lain sebesar **Rp.240.461.796,00,-** seluruhnya merupakan reklasifikasi dari aset tetap. Selain itu termasuk juga aset

tetap yang kepemilikan dan pemanfaatannya sudah diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga. Namun, karena proses penghapusan dan administrasinya belum selesai, maka aset tersebut masih dicatat sebagai aset lain-lain.

II. KEWAJIBAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp. 40.590.000,00	Rp0,00

Kewajiban dikategorikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

- Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
- Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

Rincian Kewajiban Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:

Tabel 1.10
Rincian Kewajiban

No	Kewajiban Jangka Pendek	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
1	Kewajiban Jangka Pendek	40.590.000,00	0,00	
2	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0	0	0
3	Pendapatan Diterima Dimuka	0	0	0
4	Utang Belanja	43.490.000,00	0	
5	Utang Jangka Pendek Lainnya			
	Jumlah	84.080.000,00	0,00	0,00

III.	EKUITAS	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	DANA	Rp11.836.437.401,55	Rp11.783.134.301,55

Ekuitas dana adalah kekayaan bersih Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau, yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ekuitas Dana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2024 tercatat sebesar **Rp11.836.437.401,55** yang terdiri dari :

a.	Ekuitas Dana Lancar	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		Rp. 11.836.437.401,55	Rp0,00

Nilai Ekuitas Dana Lancar per 31 Desember 2024 sebesar **Rp11.836.437.401,55** terdiri dari:

1.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		Rp. 124.479.201,64	Rp. 234.253.820,00,-

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2024 sebesar **Rp. 124.479.201,64** yang diperoleh dari perhitungan berikut:

Kas di bendahara pengeluaran	Rp0,00
Hutang PFK	Rp0,00
SiLPA	Rp. 124.479.201,36,-

2.	Cadangan Piutang	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		Rp. 0,-	Rp. 0,-

Saldo cadangan piutang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 0,-, merupakan lawan akun piutang bersih sebesar Rp. 0,-

3.	Cadangan Persediaan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		Rp. 0,-	Rp. 0,-

Saldo cadangan persediaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 0,- merupakan lawan akun persediaan sebesar Rp. 0,-

b.	Ekuitas Dana Investasi	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		Rp. 0,-	Rp. 0,-

Saldo ekuitas dana investasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 0,- terdiri dari:

1.	Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		Rp. 0,-	Rp. 0,-

Saldo Diinvestasikan Dalam Aset Tetap Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau Pada tanggal per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 0,- merupakan lawan akun Aset Tetap.

2.	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		Rp0,00	Rp0,00

Saldo Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau Pada tanggal per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 0,- merupakan lawan akun Aset Lainnya.

C. LAPORAN OPERASIONAL

1. Pendapatan-LO

Anggaran dan realisasi pendapatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024, sebagai berikut :

*Tabel 1.11
Anggaran Dan Realisasi Pendapatan*

No Rek	Uraian	Anggaran(Rp)	Realisasi (Rp)	% tase
	PENDAPATAN-LO	0,00	0,00	0,00
	PENDAPATAN ASLI DAERAH-LO	0,00	0,00	0,00
	Pajak daerah-LO	0,00	0,00	0,00
	Retribusi daerah-LO	0,00	0,00	0,00
	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah-LO	0,00	0,00	0,00

1.1 Pendapatan Asli Daerah-LO

Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2024 sebesar Rp. 0,- atau 0% dari anggaran Pendapatan Asli Daerah yang ditargetkan sebesar Rp. 0,- Penjelasan atas realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2024 sebagai berikut :

a) Pendapatan Pajak Daerah-LO

Realisasi pendapatan pajak daerah tahun 2024 sebesar Rp. 0,- atau 0% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp. 0,-

b) Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Realisasi pendapatan retribusi daerah tahun 2024 sebesar Rp. 0,- atau 0% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp. 0,-

c) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah-LO

Realisasi Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tahun 2024 sebesar Rp. 0,- atau 0% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp. 0,-

a) Beban - LO

Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik. Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, , Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban Penyusutan dan Amortisasi dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp.10.596.420.671,36,- dengan rincian :

*Tabel 1.12
Rincian Beban*

No Rek	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
	BEBAN	10.596.420.671,36	13.236.378.826,00
	Beban Operasi, Penyusutan dan Amortisasi	0,00	663.148.815,00
	Beban Pegawai	5.887.518.189,00	5.622.607.668,00
	Beban Barang dan Jasa	4.708.902.482,36	6.950.622.243,00
	Beban Hibah	0	0
	Beban Bantuan Sosial	0	0
	Beban Penyisihan Piutang	0	0
	Beban Penyusutan dan Amortisasi	0,00	663.148.815,00

1.1 Beban Operasi

Rincian Beban Operasi adalah sebagai berikut :

a) Beban Pegawai

Pada tahun 2024 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau mencatat realisasi Beban Pegawai sebesar Rp.5.887.518.189,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.13
Rincian Beban Pegawai

URAIAN	NILAI
1	2
Belanja Pegawai	5.916.342.660,35
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.811.552.067,35
Belanja Gaji Pokok ASN	1.264.298.600,00
Belanja Gaji Pokok PNS	1.264.298.600,00
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	112.857.946,00
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	112.857.946,00
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	123.620.000,00
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	123.620.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	78.585.202,00
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	78.585.202,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	29.275.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	29.275.000,00
Belanja Tunjangan Beras ASN	63.802.020,00
Belanja Tunjangan Beras PNS	63.802.020,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	7.619.902,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	7.619.902,00
Belanja Pembulatan Gaji ASN	19.605,35
Belanja Pembulatan Gaji PNS	19.605,35
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	121.041.524,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	121.041.524,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.608.074,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.608.074,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	7.824.194,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	7.824.194,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	3.754.974.593,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.685.395.486,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.685.395.486,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	442.968.537,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	442.968.537,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.626.610.570,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.626.610.570,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	349.816.000,00
Belanja Honorarium	349.816.000,00
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	341.656.000,00
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.160.000,00

b) Beban Barang dan Jasa

Pada tahun 2024 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau mencatat realisasi Beban Barang dan Jasa sebesar Rp.4.708.902.482,36,- dengan rincian sebagai berikut

Tabel 1.13
Rincian Beban Barang dan Jasa

URAIAN	NILAI
1	2
Belanja Barang dan Jasa	4.699.344.738,55
Belanja Barang	1.112.602.953,20
Belanja Barang Pakai Habis	1.112.602.953,20
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	850.000,00
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	229.762.728,00
Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	0,00
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	0,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	4.400.000,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	1.300.000,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	1.990.000,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	2.263.734,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	36.575.161,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	28.416.410,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	44.546.511,55
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3.150.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	3.076.713,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	15.482.761,40
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	8.924.714,25
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	10.088.124,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	8.547.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	3.374.400,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,00
Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	4.292.303,00
Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	477.514.594,00
Belanja Natura dan Pakan-Natura	1.210.788,00
Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	48.698.505,00

Belanja Makanan dan Minuman Rapat	145.229.046,00
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	14.594.460,00
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00
Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	18.315.000,00
Belanja Pakaian Penyelamatan	0,00
Belanja Pakaian Teknik	0,00
Belanja Pakaian KORPRI	0,00
Belanja Pakaian Olahraga	0,00
Belanja Jasa	2.302.991.913,00
Belanja Jasa Kantor	2.002.512.735,00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	37.520.000,00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	192.000.000,00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1.330.482.335,00
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	180.000.000,00
Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	390.000,00
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	45.655.200,00
Belanja Tagihan Telepon	515.221,00
Belanja Tagihan Listrik	86.707.225,00
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	0,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	32.761.606,00
Belanja Paket/Pengiriman	68.018.500,00
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	28.462.648,00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	65.532.218,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	57.776.093,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	3.447.100,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	4.309.025,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	50.230.000,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	12.490.000,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	6.000.000,00
Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	0,00
Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	8.240.000,00
Belanja Sewa Perkakas Bengkel Kerja	0,00
Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	23.500.000,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	184.716.960,00
Belanja Sewa Bangunan Gudang	150.000.000,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00
Belanja Sewa Bangunan Parkir	8.880.000,00
Belanja Sewa Hotel	17.220.000,00

Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	8.616.960,00
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	0,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	0,00
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	0,00
Belanja Pemeliharaan	204.514.381,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	142.616.436,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	105.897.550,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	9.799.331,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	3.026.970,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	10.156.500,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	0,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	13.736.085,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	0,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	49.105.000,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	49.105.000,00
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	12.792.945,00
Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain	12.792.945,00
Belanja Perjalanan Dinas	1.079.235.491,35
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.079.235.491,35
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.079.235.491,35
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.100.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	4.650.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	20.280.000,00

c) Beban Hibah

Pada tahun 2024 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau mencatat realisasi Beban Hibah sebesar Rp. 0,-

d) Beban Bantuan Sosial

Pada tahun 2024 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau mencatat realisasi Beban Bantuan Sosial sebesar Rp. 0,-

e) Beban Penyisihan Piutang

Pada tahun 2024 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau mencatat realisasi Beban Penyisihan Piutang sebesar Rp. 0,-

f) Beban Penyusutan dan Amortisasi

Pada tahun 2024 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau mencatat realisasi Beban Amortisasi sebesar Rp. 0,-

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

A. Bentuk Hukum dan Domisili Entitas Akuntansi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Perda No. 6 Tahun 2010.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau beralamat di Jalan Tugu Pahlawan No. 18 Tanjungpinang.

B. Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersifat Nir Laba (tidak bertujuan mencari keuntungan), dengan kegiatan pokok adalah pemberian layanan kepada masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan rakyat di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan sasaran pembangunan yang terarah dan terintegrasi dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau, sebagai amanat dalam mencapai visi dan misi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

BAB VII

P E N U T U P

Catatan atas Laporan Keuangan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau atas pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023, dengan beberapa simpulan sebagai berikut :

1. Total belanja yang terealisasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebesar **Rp.10.566.225.571,36,-** atau **98,84%** dari anggaran belanja yang direncanakan pada Tahun 2024 sebesar **Rp.10.690.704.773,00,-**
2. Nilai aset yang dikuasai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2024 sebesar Rp.11.403.808.215,55,-
3. Nilai kewajiban yang masih ditanggung Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2024 sebesar Rp.40.590.000,00,-
4. Nilai Ekuitas dana yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2024 sebesar Rp.11.836.437.401,55,-

Demikian laporan Keuangan ini kami susun, agar dapat dipergunakan oleh semua pihak yang berkepentingan di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.